

MEMBANGUN KARAKTER KEINDONESIAAN PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBAL

Oleh:
Terra Erlina¹

ABSTRACT

This study aimed to explain the Pancasila and the 1945 Constitution noble's values. Civics as a moral value education requires a humanistic approach and no longer indoctrination which they can build democratic citizens towards civilized society (civil society). The method used descriptive qualitative includes the following steps: (1). observation (2). interview, (3). Content analysis (document analysis), (4). Triangulation. The results showed that the portfolio-based learning model was able to foster a number of citizenship competencies as a whole, namely smart children and citizens as well as participatory and responsible Indonesian citizens.

Keywords: Character, Pancasila

PENDAHULUAN

Upaya membangun dan membangkitkan kembali karakter bangsa (keindonesiaan) di era global sekarang ini adalah hal yang sangat penting. Sebab membangun karakter bangsa (national character building) pada hakekatnya adalah upaya memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa (nation-state) dalam mencapai kehormatan, peradaban, dan kebesaran bangsa (Indonesia). Disadari bahwa membangun karakter bangsa bukan hal mudah dan instan, tetapi dibutuhkan komitmen dan disiplin yang tinggi dari berbagai komponen bangsa. Untuk itu diperlukan upaya sadar yang tanpa henti dengan pendekatan yang komprehensif, sistemik dan berkelanjutan.

Komitmen membangun karakter bangsa keindonesiaan Pancasila ini sejatinya telah tumbuh dan berkembang sejak zaman perjuangan hingga kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Karakter bangsa yang dimaksud adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 yang tercermin dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ironinya di masa reformasi sekarang ini, nilai-nilai karakter bangsa itu telah memudar bahkan hilang. Bermula sejak reformasi bergulir pada tahun 1997, akhlak sebagian anak bangsa telah kehilangan ruh nilai-nilai luhur Pancasila. Azyumardi Azra (2007) menyebutnya kini telah terjadi krisis sosial budaya yang menjelma dalam bentuk “disintegrasi dan

¹Terra Erlina adalah Dosen pada Prodi. Pendidikan Sejarah Universitas Galuh, Ciamis. Penulis dapat dihubungi di nomor 085720064055 / alamat email : Terraerlina77@gmail.com

dislokasi” di banyak kalangan masyarakat. Disintergrasi sosial-politik terjadi akibat euforia kebebasan yang kebablasan, hilangnya kesabaran sosial (*social temper*) sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan dan anarki, sulitnya menerima kekalahan dalam setiap pemilu, baik pusat maupun daerah yang seringkali berujung bentrok antar pendukung, merajalelanya perilaku korupsi oleh para pejabat baik pusat dan daerah, dan lain-lain. Sementara, dislokasi terjadi akibat meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat, sehingga melahirkan budaya “hibryd” yang dapat mengancam lunturnya budaya dan kepribadian lokal dan nasional.

Mencermati kecenderungan itu maka membangun dan membangkitkan karakter bangsa menjadi hal yang serius dan mendesak. Meminjam istilah Sunaryo Kardinata, Mantan Rektor UPI Bandung dalam tulisannya di *Pikiran Rakyat* (28/8/2012) bahwa menghadapi krisis moral bangsa saat ini diperlukan “revolusi moral”, yakni gerakan cepat dan radikal dalam membangun kesadaran moral masyarakat yang digerakkan secara simultan dan masif menuju bangsa yang beradab. Dan pendekatan strategis untuk gerakan itu salah satunya melalui proses pendidikan. Sebab, tujuan pendidikan sesungguhnya merupakan upaya pembentukan manusia yang beradab dan berbudaya. Diperkuat oleh Tilaar (2002, hlm. 7) bahwa pendidikan itu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas yakni suatu masyarakat Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri dan berwawasan budaya.

Di persekolahan, sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata

pelajaran yang secara khusus membentuk karakter warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam sejarah kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perubahan istilah dan paradigma, mulai dari *Civics* tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan Kewiraan Nasional tahun 1960-an, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tahun 1985, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003.

Akan tetapi disadari bahwa perubahan istilah-istilah itu tidak serta merta menghasilkan output pendidikan yang diharapkan, bahkan kini memunculkan gugatan dan tuduhan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dianggap gagal membentuk karakter anak bangsa yang bermoral dan berakhlak Pancasila. Merebaknya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada masa orde baru; menurunnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; meluasnya peredaran narkoba di setiap kalangan dan lapisan; merebaknya tawuran pelajar dan konflik sosial bernuansa SARA di beberapa daerah di negeri ini telah memperkuat gugatan dan tuduhan itu. Mencermati hal itu, Pendidikan Kewarganegaraan dalam kedudukan keilmuan dan paradigma barunya harus dapat menjadi wahana penanaman nilai-nilai karakter kebangsaan, terutama dihadapkan dengan tantangan arus globalisasi yang banyak menawarkan budaya dan karakter Barat yang sekuler.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Syaodiq, S., 2017, hlm. 60).

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya yaitu: perencanaan, memulai pengumpulan data, pengumpulan data dasar, pengumpulan data penutup, melengkapi.

1. Perencanaan. Perencanaan meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan lokasi yang dipilih serta informan-informan sebagai sumber data.
2. Memulai pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti berusaha menciptakan hubungan baik, menumbuhkan kepercayaan serta hubungan yang akrab dengan individu-individu dan kelompok yang menjadi sumber data. Peneliti memulai wawancara dengan informan yang telah dipilih untuk kemudian dilanjutkan dengan member-check. Selanjutnya dilengkapi dengan dokumen (triangulasi).
3. Pengumpulan data dasar. Dalam tahap ini diintensifkan dengan wawancara yang lebih mendalam, observasi dan pengumpulan dokumen yang lebih intensif. Dalam pengumpulan

data dasar, peneliti benar-benar melihat, mendengarkan, membaca dan merasakan apa yang ada dengan penuh perhatian. Sementara pengumpulan data terus berjalan, analisis data mulai dilakukan, dan keduanya terus berjalan, analisis data mulai dilakukan, dan keduanya terus dilakukan berdampingan sampai tidak ditemukan data baru lagi. Deskripsi dan konseptualisasi diterjemahkan dan dirangkumkan dalam diagram-diagram yang bersifat integratif. Setelah pola-pola dasar terbentuk, peneliti mengidentifikasi ide-ide dan fakta-fakta yang membutuhkan penguatan dalam fase penutup.

4. Pengumpulan data penutup. Pengumpulan data berakhir setelah peneliti meninggalkan lokasi penelitian, dan tidak melakukan pengumpulan data lagi. Peneliti mengakhiri pengumpulan data setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan atau tidak ditemukan lagi data baru. (5). Melengkapi. Langkah ini merupakan kegiatan menyempurnakan hasil analisis data dan menyusun cara menyajikannya (Syaodiq, S., 2017, hlm. 114).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKn Baru dalam Paradoks Kehidupan Berbangsa

Tantangan kasat mata yang dihadapi PKn dalam alam reformasi sekarang ini adalah kondisi paradoks antara idealitas konsep dan muatan nilai dan moral Pancasila dan konstitusi negara dengan fenomena kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi dan ideologi-keagamaan di Indonesia. Pada titik

akhir fenomena itu telah memunculkan terjadinya krisis nilai dan moral yang jauh dari budaya hidup ber-Pancasila. Pancasila yang menurut Soekarno digali dari jiwa budaya masyarakat Indonesia, kini semakin tercerabut dari akar budaya bangsa ini. Kesakralan Pancasila mulai memudar sebagai lambang dan jiwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, para pejabat publik seolah enggan berbicara tentang Pancasila karena khawatir dianggap sebagai 'antek' orde baru.

Krisis ketidakpedulian terhadap Pancasila itu akan semakin menjauhkan anak bangsa dari pengakuan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai identitas Nasional dan faktor pemersatu. Setidaknya ada tiga faktor menurut Azyumardi Azra (2007) yang menyebabkan Pancasila semakin dilupakan dan sulit terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa yakni : Pertama Pancasila tercemar karena kebijakan pemerintahan Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Kedua, Presiden BJ Habibie telah melakukan liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasis agama. Ketiga, otonomisasi daerah telah mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Disengaja ataupun tidak bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah menjadikan Pancasila semakin kehilangan posisi sentralnya sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.

Menyikapi kondisi krisis Pancasila di atas, maka penulis memandang perlu

adanya "pemutihan" dan revitalisasi Pancasila yakni dengan membawa kembali Pancasila ke dalam wacana dan arena kesadaran publik. Sebab tidak ada yang salah dengan Pancasila, yang keliru adalah pemaksaan pemaknaan Pancasila untuk kepentingan pemerintahan di masa lalu (orde baru) dengan pendekatan indoktrinatif dan rejimentatif. Dengan demikian masyarakat dapat mengenal kembali dan memberikan pemikiran dan pemaknaan baru untuk kembali dapat mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif semua komponen warga negara (di rumah, di kehidupan masyarakat dan negara) dalam mendiseminasi dan sosialisasikan Pancasila. Dalam tugas yang bersamaan, pendidikan kewarganegaraan di persekolahan bertanggung jawab dalam mengembangkan akhlak kewarganegaraan Pancasila. Inilah tantangan nyata secara konseptual dan operasional bagi Pendidikan Kewarganegaraan di era global sekarang ini.

Menjawab tantangan paradoks kehidupan ini, Pendidikan Kewarganegaraan mereposisi peran dan kedudukannya seiring dengan adanya reformasi Sistem Pendidikan Nasional yang ditandai oleh lahirnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan diikuti oleh peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya. PKn dalam paradigma barunya ini bercirikan struktur keilmuan yang jelas yakni berbasis ilmu politik, hukum dan filsafat moral (Pancasila). Misi yang diemban PKn baru tertuang nyata dalam pasal 3 UUSPN sebagai fungsi dan tujuan pendidikan Nasional secara umum yakni "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Sedangkan secara khusus, tertuang pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Menelaah tujuan umum dan khusus tersebut maka pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan nilai moral kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Pada gilirannya Pendidikan Kewarganegaraan ini, menurut Winataputra (2006) harus dapat menumbuhkan “civic intelligence” dan “civic participation” serta “civic responsibility” anak bangsa dan Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian bagi pendidikan di Indonesia, PKn merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 1945 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik.

Karakter Keindonesiaan Pancasila di Era Global

Konsep karakter dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti watak, yakni sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan perangai yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Dalam pengertian itu, maka membangun karakter dapat dimaknai sebagai suatu proses mengukir atau memahat jiwa

manusia sehingga dapat memiliki nilai-nilai yang melandasi pemikiran, sikap dan perilakunya secara baik. Karakter ini erat kaitannya dengan kebiasaan (habit) yang secara terus menerus dipraktekkan. Oleh karenanya membangun karakter memerlukan waktu lama dan terus menerus, sehingga tingkah laku itu menjadi kebiasaan dan membentuk watak atau tabiat seseorang.

Berkaitan dengan konsep itu, maka karakter keindonesiaan Pancasila dimaksudkan pada cara berpikir, pola sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian pembangunan karakter bangsa keindonesiaan juga dimaknai sebagai proses terus-menerus dalam membina, memperbaiki dan mewariskan konsep dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan UUD 1945. Sehingga nilai-nilai itu mempribadi (internalized, personalized) ke dalam diri individu maupun bangsa Indonesia.

Seiring dengan tuntutan era global sekarang ini, karakter bangsa yang harus terus dibangun adalah pola pikir, sikap dan perilaku warga, perilaku Warga Negara Indonesia yang demokratis, cerdas dan religius. Hal ini sejalan dengan muatan cita-cita dan tujuan pendidikan bangsa secara umum. Penciptaan tatanan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penting dilakukan. Sebab, kehidupan sosial politik bangsa sejak reformasi bergulir di negeri ini, belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas demokrasi konstitusional yang sebenarnya. Nilai, prinsip dan kaidah demokrasi belum dapat dilaksanakan oleh

segenap komponen bangsa dengan benar dan penuh kesadaran. Baik disengaja atau pun tidak, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan demokratisasi bangsa. Seperti misalnya berbagai aksi anarki dalam perhelatan pemilu di berbagai daerah. Menerima kekalahan dengan sikap lapang dada menjadi sebuah idiom sulit diwujudkan. Selain itu, perilaku kaum elit politik cenderung masih berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik berbaju simbol-simbol kultural maupun keagamaan. *Mainstream* perilaku kalangan elit ini pun pada akhirnya mudah berimbas kepada perilaku politik massa, semisal, sering terjadinya tawuran antar suku atau kampung, antar pelajar, demonstrasi anarkis, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mencermati krisis akhlak demokrasi tersebut maka agenda penting dan urgen dilakukan adalah membangun budaya demokrasi konstitusional Indonesia. Budaya demokrasi ini mengandung misi pembangunan ide, nilai, prinsip dan konsep demokrasi melalui instrumentasi demokrasi dalam berbagai latar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, bukanlah demokrasi Barat yang sekuler, tetapi demokrasi yang “berke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Sanusi (2007) ada sepuluh pilar pengembangan demokrasi di Indonesia (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yakni: Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan

Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pengembangan budaya kewarganegaraan demokratis, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan beradab. Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi (Winataputra, 2001). Untuk tujuan itu, maka kurikulum dan proses pembelajaran perlu diupayakan agar lebih mengarah pada tujuan pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam bentuk transformasi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dapat mendukung berkembangnya budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Ada dua alasan menurut Azra (2007, hlm. 3), mengapa Pendidikan Kewarganegaraan untuk demokrasi ini penting dilakukan dengan serius sekarang ini. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan “*political illiteracy*”, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya apatisisme politik (*political apathism*) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Atas argumentasi tersebut, maka pendidikan

kewarganegaraan adalah salah satu upaya sistemik penyemaian konsep, prinsip, nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi.

Strategi PKn dalam Membangun Karakter dan Budaya Demokratis

Membangun nilai atau karakter merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan Kewarganegaraan secara konsep dan substantif merupakan pendidikan nilai, dalam hal ini nilai dan moral Pancasila. Budimansyah dan Suryadi (2008) menegaskan bahwa PKn sebagai program pendidikan yang berada dalam koridor “value based education”.

Kegagalan dan kelemahan PKn di masa lalu (orde baru) harus segera dibenahi saat ini. Paradigma dan pendekatan yang dogmatis, indoktrinasi dan rejimentatif harus diubah menjadi paradigma dan pendekatan yang lebih humanistik. Dalam praktek pembelajarannya, pendekatan humanistik mendasarkan bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi dan harus ditempatkan sebagai subyek belajar agar dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan demokratis.

Ada beberapa pilihan strategi dasar yang dapat dikembangkan PKn sebagai wahana pendidikan karakter demokratis ini, seperti yang ditulis Winataputra (2001) yakni strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar (multy media and resources), kajian interdisipliner (interdisciplinary studies), pemecahan masalah sosial (problem solving), penelitian sosial (social inquiry), aksi sosial (social involvement), pembelajaran berbasis portofolio (portfolio-based learning). Penulis tidak bermaksud untuk mengurai lebih lanjut masing-masing

strategi itu, akan tetapi akan memberikan tentang strategi mana yang dinilai paling baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran Berbasis Portofolio: Pilihan Model

Model pembelajaran berbasis portofolio (portfolio-based learning) merupakan pembelajaran nilai moral untuk mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwakan nilai-nilai Pancasila. Portofolio dalam pembelajaran PKn adalah kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi/data, kemudian disusun dengan baik, yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik (public policy). Model ini mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya.

Urutan langkah-langkah pembelajaran model ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1. Pendahuluan

Pada langkah ini guru membuka pelajaran dan memberi ilustrasi mengenai nilai-nilai tanggung jawab dan demokratis yang harus dimiliki seperti menghargai perbedaan, terbuka, demokratis, kooperatif, kompetitif untuk kebaikan, empatik, argumentatif dan prospektif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penggambaran nilai-nilai itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan disampaikan.

Langkah 2. Kegiatan Inti

Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat
 2. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas
 3. Mengumpulkan Informasi yang terkait pada Masalah itu
 4. Mengembangkan Portofolio kelas
 5. Menyajikan Portofolio
 6. Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar
2. Kelompok Dua: Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk mencari pemecahan. Substansi tugasnya adalah menjelaskan kebijakan saat ini dan kebijakan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah.
 3. Kelompok Tiga: Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas. Substansi tugasnya adalah membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati untuk didukung oleh mayoritas kelas serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut.

Pada kegiatan ini, siswa dikelompokkan 3-5 orang dan diajak untuk menentukan satu topik/isu kebijakan publik yang akan dijadikan bahasan dalam pembelajaran. Setelah satu topik/isu kebijakan publik disepakati dalam diskusi kelas, setiap kelompok ditugasi untuk mencari dan mengumpulkan sumber kepustakaan yang ada, mengamati alam sekitar, bertanya kepada nara sumber misalnya guru agama, tokoh agama di lingkungannya dan lain-lain.

Setelah itu kelas dibagi dalam empat kelompok, masing kelompok 4-5 orang siswa. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas. Setiap kelompok memiliki tugas berbeda, namun dari mulai kelompok satu sampai keempat harus saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keempat kelompok tersebut masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Satu: Menjelaskan Masalah. Kelompok ini bertanggung jawab menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Substansinya menjelaskan mengapa masalah itu penting dan mengapa lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.

4. Kelompok Empat: Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas. Substansi tugas kelompok ini adalah membuat rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung kelas.

Di dalam setiap langkah siswa belajar secara mandiri dalam kelompok kecil dengan fasilitasi dari guru dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di sekolah dan di luar sekolah. Disitulah berbagai keterampilan kewarganegaraan dikembangkan seperti: membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian, berargumentasi dll.

Portofolio ini terbagi dalam dua bagian yakni "Portofolio tampilan", dan "Portofolio dokumentasi". Portofolio Tampilan berbentuk papan empat muka berlipat yang secara berurutan menyajikan:

1. Rangkuman permasalahan yang dikaji

2. Berbagai alternatif kebijakan pemecahan masalah
3. Usulan kebijakan untuk memecahkan masalah
4. Pengembangan rencana kerja/tindakan

Sedangkan Portofolio Dokumentasi dikemas dalam Map Ordner atau sejenisnya yang disusun secara sistematis mengikuti urutan Portofolio Tampilan. Portofolio tampilan dan dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi "Public Hearing" atau dengar pendapat yang menghadirkan pejabat setempat yang terkait dengan masalah portofolio tersebut. Acara dengar pendapat dapat dilakukan di masing-masing kelas atau dalam suatu acara "Show Case" atau "Gelar Kemampuan" bersama dalam suatu acara sekolah.

Langkah 3. Penutup

Sepuluh menit dari pertemuan tatap muka kedua digunakan oleh guru untuk memberi penegasan dan penguatan terhadap nilai yang implisit melekat dalam pertanyaan pemicu, yakni nilai-nilai yang terkandung hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara seperti peka, tanggap, terbuka, demokratis, kooperatif, kompetitif untuk kebaikan, empatik, argumentatif dan prospektif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

SIMPULAN

Membangun karakter bangsa adalah hal penting dalam tantangan krisis akhlak bangsa sekarang ini. Kesadaran publik harus segera digerakan dan didorong untuk kembali mengenali dan mengamalkan

nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Upaya pembangunan karakter yang strategis dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Di persekolahan, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini memiliki peran dan kedudukan yang kuat sebagai pendidikan nilai moral, pendidikan politik demokrasi, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam menjawab tantangan dan tuntutan globalisasi, PKN sebagai pendidikan nilai moral memerlukan pendekatan yang humanistik dan tidak lagi indoktrinatif, sehingga mampu membangun warga negara demokratis menuju masyarakat yang beradab (civil society). Diantara model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran berbasis portofolio. Diharapkan mampu menumbuhkan sejumlah kompetensi kewarganegaraan secara utuh yakni anakbangsa dan warga negara Indonesiacerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.

Alat musik Angklung Gubrag sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Cigudeg sebagai media ritual dalam upacara Seren Taun yang bertujuan untuk memuja Nyi Pohaci. Penggunaannya

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2007). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. Makalah *Seminar Nasional II Civic Education di Perguruan Tinggi*, Mataram, 22-23 April
- Azra, A. (2007). Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme. *Makalah Semiloka Nasional*. Yogyakarta, 13 Agustus 2007.

- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.
- Kartadinata, S. (2012). "Saatnya Revolusi Moral". Bandung: *Harian Umum Pikiran Rakyat*, 28 Agustus 2012.
- Sanusi, A. (2007). "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi". *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PMPKn FPIPS UPI.
- Sukmadinata, Nana Syaodiq. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosda. Bandung.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winataputra, U.S. (2006). "Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah : Tinjauan Psiko-Pedagogis". Makalah *Seminar Pendidikan dan Pembudayaan Nilai-Nilai Dasar Pancasila*. Jakarta, 8 Juni 2006.
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Ringkasan Desertasi Doktor pada FPS UPI Bandung: tidak diterbitkan.